

ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR ROB: STUDI KASUS KOTA PEKALONGAN

Kuat Ismanto ¹⁾, Suryo Pratikwo ²⁾, Benny Diah Madusari ³⁾, Paminto Agung Christianto ⁴⁾

¹ IAIN Pekalongan

² Program Studi Keperawatan Pekalongan, Poltekkes Kemenkes Semarang

³ Universitas Pekalongan

⁴ STMIK Widya Pratama Pekalongan

Email: ¹ kuat.ismanto@iainpekalongan.ac.id, ² suryopratikwo@yahoo.co.id,
³ bennydiah@gmail.com, ⁴ p_a_chr@stmik-wp.ac.id

Abstrak

This paper identifies the needs of victims affected by tidal flooding. In addition, it explores people's expectations of government policies in resolving tidal floods. The research was conducted in Pekalongan City which includes four sub-districts. Data were obtained through observation, questionnaires, interviews, documentation, and Focus Group Discussions (FGD). From the distribution of questionnaires obtained 100 respondents. The FGD was held by inviting government agencies in Pekalongan City and having involvement in the problem of tidal flooding. The results of the study show that the needs of the community affected by the tidal flood that must be met on a priority basis include: basic food needs, health needs, survival needs, spiritual and (religious) needs. From the results of the FGD, it was concluded that each agency had worked according to its duties. However, coordination and consolidation need to be improved. From this research, priority needs and disaster management strategies can be drawn that can be used for handling

Keywords: *Pekalongan City; tidal flood, disaster mitigation; refugee needs*

1. PENDAHULUAN

Banjir rob seperti telah menjadi langganan bagi wilayah utara Pulau Jawa, tidak terkecuali Kota Pekalongan. Pada beberapa pekan terakhir ini, khususnya di bulan Mei 2020 gelombang air laut cukup besar dan sampai di permukiman warga. Hal demikian semakin parah ketika Kota Pekalongan dinyatakan sebagai daerah yang terjadi penurunan tanah tiap tahun 20 cm bahkan bisa sampai 30 cm (Suara Merdeka, 2019). Di Kabupaten Pekalongan yang bersebelahan dengan Kota Pekalongan, adanya banjir rob ini telah berdampak negatif, seperti rusaknya permukiman warga, hilangnya daratan, kerugian ekonomi karena tambak dan sawah yang rusak tergenang air, serta rusaknya beberapa fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan sebagainya (Dhandhun Wacano, Achmad Andi Rif'an, Eni Yuniastuti, Ratna Wulandari Daulay, 2013).

Di antara dampak dari banjir rob di Kota Pekalongan adalah: 1) Sebagian masyarakat

terdampak rob mengungsi; 2) Kehidupan sehari-hari tidak berjalan normal; 3) Aktivitas ekonomi tidak berjalan normal; 4) Pembangunan daerah terkena rob tidak berjalan normal; 5) Kegiatan UMKM, seperti batik tidak berjalan normal; 6) Banjir rob yang berbarengan dengan pandemi Covid-19 lebih menyusahakan penanganan; 7) Pariwisata di utara Pekalongan tidak berjalan dengan baik; 8) Aktivitas keagamaan di tempat ibadah tidak berjalan; 9) Aktivitas pendidikan tidak berjalan normal; 10) Pekerja harian lepas yang berlokasi di utara Pekalongan tidak berjalan sehingga pekerja tidak berpenghasilan; 11) Para pekerja terhambat akses untuk ke tempat kerja; 12) Kesehatan masyarakat terganggu, seperti mengalami penyakit gatal-gatal; 13) Rumah penduduk banyak yang rusak; 14) Usaha perikanan tidak berjalan (Febri, Setiyono, & Manar, 2015).

Beberapa kegiatan bantuan di antaranya dilakukan oleh Polda Jateng bersama Kodam

IV/Diponegoro telah menyiapkan dapur umum lapangan bagi penanganan warga terdampak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka ikut meringankan masyarakat kita yang terdampak rob di Kota Pekalongan, khususnya sebanyak 7.700 jiwa yang terdampak (Humas Polda, 2020). Tim Gabungan BPBD, TNI, dan relawan melakukan evakuasi korban banjir rob di Krapyak Lor, Kelurahan Krapyak. Di Kota Pekalongan ada 3 dari 4 kecamatan yang terimbas banjir rob dengan ketinggian 30 hingga 120 cm. Sedikitnya, terdapat 150 warga telah diungsikan dari sejumlah lokasi (Humas Polda, 2020).

Di antara penelitian tentang rob di Kota Pekalongan dilakukan oleh Tika Mutiarawati dan Sudarmo (2017) tentang kolaborasi penanganan. Ramadhanni dan Budi Setiyono (2015) meneliti tentang prioritas perbaikan, Ali Wijaya dan Cahyono Susetyo (2017) tentang perubahan lahan, Yuniarti, dkk (2019) tentang dampak rob terhadap *stunting* anak, dan Adlina, dkk (2019) tentang strategi adaptasi masyarakat atas banjir rob. Berbagai kajian yang ada, belum ada yang secara khusus membahas analisis kebutuhan prioritas masyarakat terdampak banjir rob. Di samping itu, sejauh mana efektivitas penanganan dampak banjir rob oleh dinas atau instansi terkait di wilayah Kota Pekalongan.

Hasil penelitian Findayani (2018) menyimpulkan bahwa peran kelembagaan serta inisiatif masyarakat sangat penting dalam fase kesiapsiagaan terhadap bencana banjir rob. Kelembagaan yang sifatnya formal dan informal memiliki peran dalam pengambilan kebijakan dan sinkronisasi kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir rob. Banjir rob juga berdampak pada kawasan permukiman yang tumbuh di pesisir pantai, serta sarana dan prasarana yang mendukungnya semakin rentan dan dinamika lingkungan, sebagai akibat hilangnya kawasan lindung seperti hilangnya hutan *mangrove* (Danianti & Sariffuddin, 2015).

Banjir rob telah membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat terdampak. Meski demikian, kehidupan masyarakat juga harus berjalan dan semua kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Biaya hidup seperti makan, minum,

kewajiban keuangan juga harus menjadi perhatian pemerintah. Usaha yang sifatnya padat karya atau berdasar usaha UMKM juga harus diperhatikan. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah atas kondisi ini di saat masyarakat berada di pengungsian. Berdasar uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada penanganan korban banjir rob untuk keberlangsungan hidupnya. Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada analisis kebutuhan masyarakat dan harapan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan banjir rob.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah “penelitian lapangan (*field research*)” yang data primernya diperoleh melalui kuesioner dari lokasi penelitian (Jonker & Pennink, 2010). Artinya data lapangan menjadi basis utama penarikan simpulan yang bisa diperoleh melalui *survey*, yaitu salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. Penelitian ini dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi datanya dari sampel yang diambil dari populasi tersebut (Morissan, 2016). Lokasi penelitian berada di wilayah Kota Pekalongan yang terkena banjir rob, terutama di Kecamatan Pekalongan Timur, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Barat. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa pendapat orang yang ditabulasikan ke dalam angka. Data hasil observasi dan wawancara dinarasikan ke dalam teks secara verbatim. Data sekunder berupa data statistik dan sebagainya. Data primer diperoleh dari lapangan secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah buku, artikel, dan juga bersumber dari pemerintah, instansi, dan lainnya yang mendukung penelitian (Mulyadi, 2013).

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat terdampak banjir rob di Kota Pekalongan. Sampel diambil secara *quota sampling* di setiap lokasi penelitian dengan mempertimbangkan waktu dan protokol kesehatan pandemi Covid-19. Adapun karakter responden yang dipilih adalah di wilayah yang paling parah terkena banjir rob. Wilayah ini dikategorikan memiliki kerawanan yang tinggi

dan dianggap sebagai lokasi yang segera ditindaklanjuti oleh pemerintah selaku pemangku kepentingan. Adapun sebaran responden pada penelitian ini di antaranya:

Tabel 1 Sebaran Responden

Lokasi	Jumlah Responden
Panjang Baru	20
Panjang Wetan	20
Slamanan	20
Degayu	20
Krapyak	20
Total	100

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya (Sugiyono, 2012). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Jadi peneliti mendeskripsikan kondisi kebutuhan masyarakat yang terdampak dari adanya banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan.

Di samping data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, pengumpulan data juga melalui *Focus Group Discussion* (Saputro, 2013: 11). Hasil *survey* di atas bermanfaat bagi pengambilan fokus kajian FGD (Bungin, 2010). FGD dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020, dengan mengundang instansi yang ada di Kota Pekalongan, di antaranya: 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA); 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP2KB); 4) Dinas Pendidikan; 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6) Kantor Pelayanan Pajak Pratama; 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); 8) Kantor Pertanahan; 9) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; 10) Palang Merah Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Kebutuhan Prioritas Masyarakat Terdampak Banjir Rob Kota Pekalongan

Dari hasil penyebaran kuesioner, maka diperoleh sajian data sebagaimana tampak pada tabel 2.

Tabel 2 Deskripsi Hasil Kuesioner

Aspek	Sub Aspek	%
Profil Responden		
Jenis kelamin	Laki-laki	61
	Perempuan	39
Tingkat pendidikan	Tidak sekolah	3
	Tamat SD	20
	Tamat SMP	28
	Tamat SMA	45
	Tamat Perguruan Tinggi	4
Jenis pekerjaan	PNS/TNI/POLRI	3
	Karyawan swasta / Buruh	48
	Dagang / Wiraswasta	22
	Nelayan	8
	Petani	0
Lama bermukim	Lainnya	19
	1 - 3 th	0
	3 - 5 th	2
Status kepemilikan rumah	> 5 th	98
	Sewa/kontrak	92
	Kepemilikan Sendiri	8
Jenis bangunan rumah	Semi permanen	23
	Permanen	77
Satus tanah	Bersertifikat	97
	Tidak bersertifikat	3
Kesiapan dan Ketanggapan		
Dampak rob	Kerusakan sarana rumah tangga	13
	Terganggunya akses transportasi	9
	Gangguan kesehatan	10
	Berkurangnya pendapatan / penghasilan	19
	Terganggunya akses pendidikan	23
Alasan tetap tinggal	Terganggunya aktivitas keagamaan	26
	Tanah kelahiran	44
	Dekat dengan keluarga	14
	Dekat dengan tempat kerja	42
	Kesiapan menghadapi banjir	Menyiapkan tempat pengungsian
Membuat tempat penyimpanan barang		14
Meninggikan rumah		38
Membuat tanggul agar air tidak masuk rumah		43

Aspek	Sub Aspek	%	Aspek	Sub Aspek	%
Kebutuhan hidup			Tindakan kesehatan	Periksa ke dokter	10
Lembaga pemberi bantuan	Pemerintah	36		Periksa ke Puskesmas	52
	Keluarga	44		Diobati sendiri	37
	LSM	3		Ke pengobatan alternatif	1
	Swasta	8	Kebutuhan kesehatan	Kunjungan petugas kesehatan	49
	Lainnya	9		Pengobatan gratis	45
Jenis bantuan yang diterima	Persediaan makanan	48		Ketersediaan klinik kesehatan <i>mobile</i>	5
	Pemeriksaan kesehatan	30		Disediakan konsultasi kesehatan <i>online</i>	1
	Perbaikan rumah	9	Keagamaan		
	Uang	3	Kebutuhan ibadah	Sarana dan tempat ibadah	24
	Lainnya	10		Sarana ibadah	26
Kebutuhan sembako	Beras	4		Tempat ibadah	50
	Makanan siap saji	3			
	Air minum	6			
	Obat-obatan	9			
	Pakaian	15			
	Kebutuhan bayi	16			
	Selimut	12			
	Perlengkapan kebersihan	10			
	Alas tidur	12			
	Sanitasi (MCK)	13			
Kebutuhan bertahan hidup					
Kebutuhan bertahan hidup	Perbaikan rumah	13			
	Perbaikan fasilitas umum	6			
	Peninggian tanggul sungai	37			
	Perbaikan sarana transportasi	14			
	Penyediaan fasilitas MCK Umum	30			
Peringatan kewajiban	Peringatan angsuran kredit lembaga keuangan	6			
	Peringatan pembayaran PBB	22			
	Peringatan PLN	39			
	Peringatan pembayaran PDAM	33			
Kesehatan					
Dampak kesehatan	ISPA (batuk)	18			
	Diare	24			
	Gatal (penyakit kulit)	27			
	Hipertensi (tekanan darah tinggi)	2			
	Gastritis (Maag/asam lambung)	2			
	Asma (sesak nafas)	5			
	Sakit kepala	22			
	Mal nutrisi (kurang gizi)	0			

Sumber: Peneliti, diolah 2020

Pemetaan kebutuhan bagi masyarakat terdampak bencana merupakan unsur penting dari penanganan persoalan (Marselina & Widodo, 2015). Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa banjir rob telah berdampak pada terganggunya keberlangsungan hidup masyarakat Kota Pekalongan, khususnya di wilayah utara. Dampak itu berupa: terganggunya pendidikan, kesehatan, keagamaan, pekerjaan, dan kehidupan lainnya. Dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat terdampak diperoleh simpulan bahwa untuk bertahan hidup tinggal di wilayah itu, mereka membutuhkan peninggian tanggul sungai. Di saat banjir rob terjadi, mereka sangat membutuhkan peralatan bayi. Dalam mendukung hidup keseharian, mereka membutuhkan keringanan pembayaran PLN. Dalam bidang kesehatan dibutuhkan kunjungan petugas kesehatan. Pada bidang keagamaan mereka sangat membutuhkan tempat ibadah yang bersih.

3.2. Hasil Focus Group Discussion (FGD)

Hasil FGD yang diselenggarakan oleh Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan bersama instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan disajikan, sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil FGD

No	Dinas/Kantor/Badan	Masukan dan Saran
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA)	Selama ini, yang dibutuhkan masyarakat terdampak banjir rob, selain kebutuhan individu (kesehatan, pangan, dll) juga kebutuhan bersama/sekelompok masyarakat, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Pompa air - Sarana sanitasi/toilet portabel - Air bersih
2	Dinas Kesehatan	Kebutuhan masyarakat terdampak banjir rob adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Sarana sanitasi, karena saat ini banyak MCK yang sudah tidak bisa digunakan akibat terendam banjir rob - Untuk tempat pengungsian maka kebutuhan utamanya ada pada ketersediaan air bersih dan jumlah MCK yang cukup dengan jumlah pengungsi yang tertampung. - Tiga penyakit/keluhan kesehatan dari masyarakat terdapat banjir rob adalah ISPA, diare dan gatal kulit. - Saran: perlu melakukan kajian untuk mendapatkan model sanitasi/MCK yang cocok pada wilayah banjir rob, apakah model MCK apung atau model lainnya.
3	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mencari penyebab pasti tentang keengganan masyarakat untuk pindah dari wilayah banjir rob, apakah karena masyarakat tidak memiliki dana untuk membeli rumah baru di wilayah lain? Atau apakah masyarakat tidak memiliki keterampilan baru yang bisa dikerjakan di wilayah lain? - Banjir rob biasanya ada di sekitar bulan Maret sampai Juni pada setiap tahunnya. - Pemerintah Kota Pekalongan sudah menyiapkan tempat pengungsian, namun masyarakat terdampak banjir rob, khususnya yang berada di Kecamatan Pekalongan Utara enggan memanfaatkannya. - Saran: perlu ada kajian tentang budaya, psikologi terhadap masyarakat terdapat banjir rob sehingga akan dapat ditindaklanjuti di bidang ketenagakerjaan untuk mempersiapkan masyarakat dapat beralih ke profesi yang lain yang lebih baik.
4	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Yang terdampak rob tidak hanya masyarakat yang berada di wilayah banjir rob, namun juga para tenaga pendidik yang berasal dari luar wilayah banjir rob namun bekerja di wilayah banjir rob. - Prioritas keamanan dan keselamatan di sarana pendidikan sangat penting, seperti ancaman binatang liar, ancaman korosi pada struktur bangunan, dan lain-lain. - Saran: perlu ada kajian tentang model sarana pendidikan yang sesuai di wilayah banjir rob, apakah model sekolah panggung atau model lain? Karena setiap tahunnya Dinas Pendidikan sudah memberikan bantuan perbaikan sarana pendidikan yang ada, namun tetap belum menyelesaikan permasalahan keamanan dan keselamatannya.
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan pompa air belum memadai, walau sudah memberikan bantuan pompa air sebanyak 20 pompa setiap tahunnya dan memiliki 3 pompa mobil sebagai pendukungnya. - Perlu adanya polder yang bisa menampung air rob di wilayah banjir rob yang belum tertangani - Perlu adanya rekayasa rekonstruksi pada semua sarpras di wilayah banjir rob, sehingga usia sarpras bisa lebih panjang pemakainnya.
6	Kantor Pelayanan Pajak Pratama	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengawasan wajib pajak untuk semua masyarakat adalah sama - Ada 6 Kelurahan yang terdampak rob, sehingga berakibat pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Ada 9300 wajib pajak yang terdiri dari 8800 wajib pajak pribadi dan 500 wajib pajak badan/yayasan/lembaga. b. Dari 9300 wajib pajak, yang melakukan pembayaran pajak hanya sekitar 1000 wajib pajak saja. c. Tidak semua masyarakat mampu memanfaatkan dan menggunakan fasilitas pembayaran pajak online.

No	Dinas/Kantor/Badan	Masukan dan Saran
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	<p>Untuk mengatasi banjir rob, maka ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normalisasi sungai, sudah lama sungai-sungai di Kota Pekalongan tidak dilakukan normalisasi sehingga sudah ada penumpukan sedimen/dangkal. - Peninggian tanggul sungai, karena itu adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng maka yang dapat dilakukan oleh Pemkot Pekalongan adalah membuat tanggul sementara. - Perlu adanya polder yang menampung air rob di wilayah banjir rob yang belum tertangani - Penyediaan dan pemeliharaan pompa air di sekitar sungai.
8	Kantor Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak status tanah yang tidak jelas batas-batasnya di wilayah banjir rob. - Kantor pertanahan sudah memfasilitasi masyarakat yang ingin mengajukan pergantian sertifikat kepemilikan tanah yang rusak karena banjir rob dengan biaya yang murah dan prosedur yang mudah asal langsung diurus oleh masyarakat yang bersangkutan. - Saran: perlu adanya kajian untuk memastikan apakah tanah yang terkena banjir rob hingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat (misal: dulu adalah sawah dan sekarang menjadi daerah banjir rob) tetap terkena pajak PBB?
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil komunikasi yang sudah dilakukan, permasalahan utama kenapa masyarakat terdampak rob tidak mau pindah ke wilayah bebas banjir rob adalah karena belum memiliki dana. - Kebutuhan utama masyarakat terdampak banjir rob adalah mereka tidak kebanjiran lagi, sehingga perlu penyelesaian banjir rob tidak boleh melupakan akar masalah penyebab banjir rob, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang ada sudah memberikan bukti bahwa penyebab utama banjir rob karena adanya penurunan tanah yang cukup cepat di Kota Pekalongan akibat eksploitasi pengambilan air tanah yang berlebihan. b. Permasalahan lain adalah tingkat pencemaran air permukaan yang tinggi (sungai), sehingga tidak dapat digunakan untuk sumber pengolahan air minum yang layak atau kalau digunakan pasti membutuhkan biaya yang besar untuk memprosesnya menjadi air yang layak. c. Kedua masalah di atas saling terkait, karena terhubung dengan kebutuhan penyediaan air bersih untuk masyarakat Kota Pekalongan d. Untuk permasalahan eksploitasi air tanah, saat ini sudah dilakukan moratorium perda/aturan terkait tentang eksploitasi air tanah.
10	Palang Merah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu mempersiapkan tempat pengusian yang layak, karena banjir rob sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. - Perlu mempersiapkan gudang logistik yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. - Saran: perlunya penyediaan sistem informasi manajemen bantuan masyarakat terdampak banjir rob, sehingga bantuan yang diberikan ke masyarakat menjadi tepat. Dari pengalaman yang ada, beberapa kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik namun ada beberapa kebutuhan masyarakat yang diberikan secara berlebihan. - Perlunya memberikan pendidikan tentang mitigasi kebencanaan ke masyarakat. - Kebutuhan masyarakat terdampak rob adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya layanan kesehatan 24 jam di wilayah terdampak banjir rob. b. Adanya layanan <i>trauma healing</i> untuk masyarakat dan khususnya untuk anak-anak usia sekolah.

Sumber: Peneliti, diolah 2020

Keterlibatan instansi pemerintah dan tenaga tanggap bencana serta didukung oleh pemahaman masyarakat korban menjadi efektivitas penanganan bencana (Rahman, 2016). Dari sajian data yang diperoleh melalui FGD, dapat ditarik simpulan bahwa setiap instansi telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Hanya saja, koordinasi dan konsolidasi antar lembaga perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan distribusi bantuan yang tidak merata di setiap lokasi seperti yang disampaikan oleh PMI Kota Pekalongan. Perbaikan manajemen perlu dilakukan agar lebih efektif dan efisien, dan tidak terjadi *overlapping* penanganan bencana.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan prioritas masyarakat terdampak banjir rob Kota Pekalongan, secara berurutan meliputi: kebutuhan bayi, pakaian, sanitasi, selimut, alas tidur, obat-obatan, air minum, beras, dan makanan siap saji. Kebutuhan prioritas dalam ibadah meliputi: tempat ibadah yang bersih, serta sarung dan mukena yang bersih pula.
- 2) Harapan masyarakat kepada Pemerintah Kota Pekalongan terhadap banjir rob.
 - a) Kebutuhan bertahan hidup meliputi: peninggian tanggul sungai, penyediaan fasilitas MCK, perbaikan sarana transportasi, dan perbaikan rumah.
 - b) Kebutuhan untuk bertahan hidup lainnya: peringanan pembayaran PLN, peringanan pembayaran PBB, dan peringanan pembayaran PDAM.
 - c) Tindakan kesehatan yang dibutuhkan: mengharapakan kunjungan kesehatan dari petugas, pengobatan gratis, dan harapan atas layanan kesehatan *mobile*.
 - d) Berkaitan dengan kebutuhan ibadah, masyarakat berharap tempat ibadah dan sarana ibadah yang bersih.

4.2. Saran

Dari hasil kajian, maka dirumuskan rekomendasi bagi berbagai pihak:

- 1) Bagi Pemerintah Kota Pekalongan:
 - a) Setiap dinas/kantor/badan yang terkait dengan penanganan banjir rob, sudah merencanakan / melaksanakan beberapa program penanganan, namun yang belum terlihat adalah sinergi antara dinas/kantor/badan yang terkait tersebut, sehingga penanganan bencana banjir rob dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak banjir rob bisa dilaksanakan secara terpadu.
 - b) Penanganan masalah banjir rob, sebaiknya tidak hanya menyelesaikan dampak banjir rob saja, namun juga bisa menyentuh penyelesaian akar masalahnya.
- 2) Bagi Bappeda Kota Pekalongan
 - a) Bappeda Kota Pekalongan untuk bisa menangkap beberapa saran yang sudah diberikan oleh beberapa dinas / kantor / badan melalui fasilitasi riset unggulan daerah atau sejenisnya.
 - b) Perlu melakukan kajian untuk mendapatkan model sanitasi/MCK yang cocok pada wilayah banjir rob, apakah model MCK apung atau model lainnya.
 - c) Perlu ada kajian tentang budaya, psikologi terhadap masyarakat terdampak banjir rob sehingga akan dapat ditindaklanjuti di bidang ketenagakerjaan untuk mempersiapkan masyarakat dapat beralih ke profesi yang lain yang lebih baik.
 - d) Perlu ada kajian tentang model sarana pendidikan yang sesuai di wilayah banjir rob, apakah model sekolah panggung atau model lain. Karena setiap tahunnya Dinas Pendidikan sudah memberikan bantuan perbaikan sarana pendidikan yang ada, namun tetap belum menyelesaikan permasalahan keamanan dan keselamatannya.

- e) Perlu adanya kajian untuk memastikan apakah tanah yang terkena banjir rob sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat (misal: dulu adalah sawah dan sekarang menjadi daerah banjir rob).
- f) Perlunya penyediaan sistem informasi manajemen bantuan masyarakat terdampak banjir rob, sehingga bantuan yang diberikan ke masyarakat menjadi tepat. Dari pengalaman yang ada, beberapa kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik namun ada beberapa kebutuhan masyarakat yang diberikan secara berlebihan.
- 3) Rekomendasi Praktis
- Moratorium pembangunan dan eksploitasi air tanah di wilayah Kota Pekalongan.
 - Penanganan pencemaran air muka tanah.
 - Perbaikan infrastruktur pendidikan dan transportasi.
 - Menyusun manajemen bantuan bencana.
 - Membuat Sistem Informasi Bencana.
 - Trauma healing*: Kyai, ustadz, psikolog, psikiater, konselor.
 - Membangun budaya tanggap bencana yang sinergis.
- Dhandhun Wacano, Achmad Andi Rif'an, Eni Yuniastuti, Ratna Wulandari Daulay, M. A. M. (2013). Adaptasi masyarakat pesisir kabupaten demak dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana wilayah kepesisiran. *Seri Bunga Rampai Pengelolaan Lingkungan Zamrud Khatulistiwa*.
- Febri, R., setiyono, B., & Manar, D. G. (2015). Implementasi Program Penanganan Banjir Rob Di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan. In *Journal of Politic and Government Studies* (Vol. 5). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/9259>
- Findayani, A. (2018). Kesiap Siagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Semarang. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografia*, 12(1), 102.
- Humas Polda. (2020). Kunjungi Pengungsi Banjir di Kota Pekalongan, Kapolda Jateng dan Pangdam Pastikan Dapur Umum Siap. Retrieved June 5, 2020, from <https://tribrataneews.jateng.polri.go.id> website: <https://tribrataneews.jateng.polri.go.id/>
- Jonker, J., & Pennink, B. (2010). *The Essence of Research Methodology*. New York and London: Springer.
- Kumparan. (2018). 10 Kebutuhan Mendesak yang Diperlukan Pengungsi Gempa dan Tsunami. Retrieved June 18, 2020, from kumparan.com website: <https://kumparan.com>
- Marselina, D. S., & Widodo, E. (2015). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Journal Dialog Penanggulangan Bencana*.
- Morissan, M. (2016). *Metode Penelitian Survei* (Ceatakan k). Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Adlina, Z. I., Sardjono, A. B., & Sari, S. R. (2019). Adaptasi Permukiman Terdampak Bencana Rob (Studi Kasus: Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan). *Jurnal Arsitektur ARCADE*. <https://doi.org/10.31848/arcade.v3i1.201>
- Bungin, B. (2010). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (cetakan ke). Jakarta: Rajawali Press.
- Danianti, R. P., & Sariffuddin, S. (2015). Tingkat Kerentanan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir Di Perumnas Tlogosari, Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 3(2), 90. <https://doi.org/10.14710/jpk.3.2.90-99>

- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*.
- Rahman, A. (2016). Peran Taruna Siaga Bencana Dalam Mitigasi Bencana Di Kabupaten Serang Dan Sukabumi. *Sosio Konsepsia*, 6(1). Retrieved from <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/311/191>
- Saputro, B. (2013). Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) Bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi. In *Aswaja Pressindo* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Suara Merdeka. (2019). Penurunan Tanah di Pekalongan Tertinggi di Dunia. Retrieved December 2, 2020, from Suara Merdeka News website: <https://suaramerdeka.news/penurunan-tanah-di-pekalongan-tertinggi-di-dunia/>
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wijaya, A., & Susetyo, C. (2017). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan Tahun 2003, 2009, dan 2016. *Jurnal Teknik ITS*. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.24454>
- Yuniarti, T. S., Margawati, A., & Nuryanto, N. (2019). Faktor Risiko Kejadian Stunting Anak Usia 1-2 Tahun Di Daerah Rob Kota Pekalongan. *Jurnal Riset Gizi*. <https://doi.org/10.31983/JRG.V7I2.5179>